



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PERSIAPAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2025—2029 DAN
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2025**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 29 OKTOBER 2024**

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 29 Oktober 2024
Waktu	: Pukul 13.46 WIB s.d pukul 15.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	: Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK); 2. Indonesian Parliamentary Center (IPC); dan 3. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) terhadap persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025
Ketua Rapat	: H. A. Iman Sukri, M. Hum.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 60 Orang Hadir, 6 Izin dari 8 Fraksi - Narasumber: 1. Ronald Rofiandi, Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) beserta perwakilannya; 2. Ahmad Hanafi, Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC); dan 3. Olivia Ch. Salampessy, Wakil Ketua Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), beserta jajaran

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam rangka persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi H. A. Iman Sukri, M. Hum.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.46 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

II. KESIMPULAN.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam rangka persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 menyetujui/menyepakati RUU dari Narasumber menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:
 - a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat;
 - c. RUU tentang Perkumpulan;
 - d. RUU tentang Perampasan Aset.
2. Indonesian Parliamentary Center (IPC) mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:
 - a. RUU tentang Revisi atas UU MPR, DPR, dan DPD;
 - b. RUU tentang Revisi atas UU Pembantuan Peraturan Perundang-undangan

Usulan RUU bersama Koalisi yang diusulkan IPC adalah:

- a. RUU Keadilan Hukum (Koalisi Energi)
- b. RUU EBET (Koalisi Bersihkan Indonesia)
- c. RUU PBJ (Koalisi Antikorupsi)
- d. Revisi UU KIP (Foni)
- e. RUU Masyarakat Adat (Koalisi Aman)

3. Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan 15 (lima belas) RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, antara lain:
 - a. RUU Perlindungan Bagi Pekerja Rumah Tangga;
 - b. RUU Masyarakat Hukum Adat;
 - c. RUU tentang Kesetaraan Gender;
 - d. RUU untuk di carry over seperti RUU Revisi atas UU Narkotika, RUU tentang Penyiaran, dan RUU Energi Baru dan Terbarukan.

III. PENUTUP.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dengan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Indonesian Parliamentary Center (IPC), dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam rangka persiapan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 29 Oktober 2024
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

